ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MARIA KURNIA PURNAYUDA

NIM : 126232100

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MARIA KURNIA PURNAYUDA

NIM : 126232100

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2024

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Maria Kurnia Purnayuda

126232100

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

F.X. Kurniawan Tjakrawala S.E., M.Si., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam pengelolaan keuangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 06 Tahun 2008 sebagai upaya pencegahan kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner sistem pengendalian internal yang diisi oleh pejabat terkait, yang kemudian diperkuat dengan wawancara untuk memperoleh wawasan tambahan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengingat minimnya penelitian mengenai audit berbasis pengendalian internal di sektor pemerintah dan meningkatnya kasus korupsi dalam akuntabilitas dan pengelolaan keuangan publik, penting untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan di pemerintahan. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023, yang dianalisis sehubungan dengan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan pengendalian internal yang tidak efektif merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap pelanggaran peraturan, yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah yang memerlukan adanya pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud, Temuan Kepatuhan, COSO, Akuntansi Sektor Publik

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Internal Control System (ICS) in financial management and Government Regulation (PP) No. 06 of 2008 as a fraud prevention measure. This study employs a qualitative descriptive approach. Primary data were gathered through questionnaire about internal control system, completed by relevant officials, which where supplemented by additional insights obtained from interviews.

Meanwhile, secondary data were sourced from the Summary of Audit Results (IHPD) for the East Nusa Tenggara Province. Given the paucity of research on internal control-based auditing in the government sector and the rising instances of corruption in public financial accountability and operations, it is critical to delve deeper into this issue to investigate the effectiveness of internal controls in preventing fraud within the government. This study identifies the causes of compliance findings in the Financial Statements of the Regional Government of Kupang City for the 2023 Fiscal Year, analyzed them in relation to the effectiveness of the Internal Control System (ICS). The findings reveal that ineffective implementation of internal control is a significant factor contributing to compliance violations of regulations, which result in state or regional losses that require recovery.

KEYWORDS: *Internal Control System (ICS); COSO Framework; Accounting Fraud; Fraud Prevention; Accounting Public Sector*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa di Surga atas segala berkat dan kasih yang telah diberikan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suami dan kedua anak penulis, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis sepanjang proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Orang tua dan kedua adik dari penulis, yang tanpa bosan memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini;
3. Pemerintah Kota Kupang baik dari Walikota, Sekda, Kepala BKAD, dan Kepala SKPD terkait yang telah memberikan dukungannya sepanjang penyusunan tugas akhir ini;
4. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
7. F. X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Program Studi PPA Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Diluar dari itu Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengguna informasi dari tugas akhir ini. Penulis juga memohon maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir terdapat kesalahanan baik lisan maupun tulisan.

Jakarta, Desember 2024

Maria Kurnia Purnayuda

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING i
ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Sistematika Pembahasan 6
BAB II LANDASAN TEORI 7
2.1 Kajian Teori 7
2.1.1 Pengertian *Fraud* 7
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 9
2.1.3 Pencegahan *Fraud* melalui Pengendalian Internal 18
2.1.4 Temuan Kepatuhan pada Tahun 2023 20
2.2 Tinjauan Pustaka 20
BAB III METODE PENELITIAN 22
3.1 Objek Penelitian 22

3.2 Metode Penelitian 23
3.3 Sumber Data.....24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....24
3.5 Teknik Analisis Data.....24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 25
4.1 Hasil.....25
4.2 Pembahasan 30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....32
5.1 Kesimpulan.....32
DAFTAR PUSTAKA 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Temuan Kepatuhan dalam LHP BPK NTT Tahun 2023

Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan Temuan Kepatuhan dalam LHP 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan Opini Audit Pemda pada Provinsi NTT

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Form Kuesioner COSO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara optimal, maka perlu dilakukan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dalam setiap pengelolaan kegiatan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan organisasi baik pimpinan maupun seluruh pegawai, dengan tujuan untuk menyajikan tingkat keyakinan yang cukup atas tercapainya visi dan misi organisasi dengan adanya pencapaian sasaran kegiatan secara optimal (PP Nomor 60 Tahun 2008). Hal ini dapat diukur dari kewajaran laporan keuangan, pengelolaan dan pengamanan aset negara, serta kepatuhan entitas terhadap perundang-undangan.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian intern amatlah bergantung dari pimpinan daerah dhi. adalah Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Pimpinan daerah perlu melaksanakan tata kelola pemerintah daerah dengan melaksanakan kewajiban atas penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan, yang dapat mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif (UU Nomor 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah mendapatkan hak untuk mengelola keuangannya sendiri baik dari sisi pendapatan maupun belanja atau dapat dikatakan dalam hal ini pemerintah menganut sistem Desentralisasi Fiskal (UU Nomor 25 Tahun 1999). Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan tersebut, pemerintah daerah memperoleh aliran kas masuk yang berupa Transfer dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah serta pengelolaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil penerimaan pendapatan tersebut, Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran tersebut untuk melakukan belanja menurut prioritas serta kebutuhan daerah yang ditetapkan melalui Perda APBD setiap tahunnya.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan negara, wajib untuk menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pengendalian intern yang dilaksanakan dengan tidak efektif, membuat adanya kesempatan yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan APBD. Dalam hal ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU Nomor 15 Tahun 2006). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah telah berjalan dengan akuntabel, tranparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu BPK juga berperan dalam mengevaluasi LKPD dan memberikan opini yang memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPK, pemeriksaan yang dilakukan kepada Pemerintah Pusat yang terdiri 83 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta 1 Laporan Keuangan BUN diketahui sebanyak 79 LKKL dan 1 LK BUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan atas 4 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sedangkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), diketahui sebanyak 493 LKPD memperoleh opini WTP, 48 LKPD memperoleh Opini WDP, 3 LKPD memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat, dan 2 LKPD mendapatkan Opini Tidak Wajar. Atas 546 LKPD yang diaudit oleh BPK, 23 diantaranya merupakan LKPD yang diterbitkan oleh Pemda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara

Timur dan mendapatkan Opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran (TA) 2023. Perkembangan Opini Audit atas entitas yang ada pada Provinsi NTT dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.

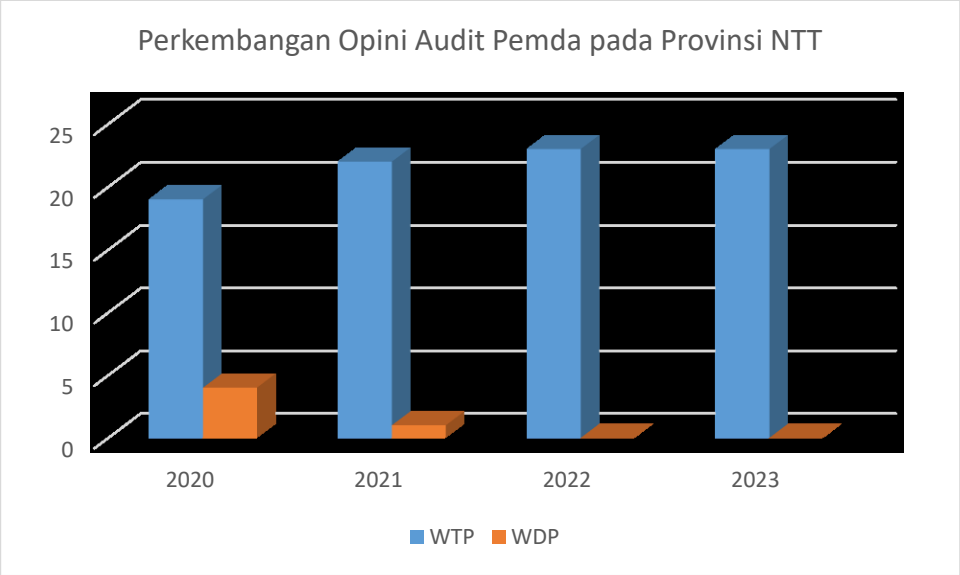

Gambar 1 Perkembangan Opini Audit Pemda pada Provinsi NTT

Dalam LHP BPK dimuat permasalahan yang dibagi ke dalam dua jenis yaitu temuan atas lemahnya pengendalian internal serta permasalahan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak timbulnya kerugian negara yang harus dipulihkan. Berdasarkan IHPS Semester 1 Tahun 2024 diketahui terdapat 7.845 permasalahan ketidakpatuhan. Dimana 4.147 permasalahan diantaranya memiliki dampak financial atau timbulnya kerugian negara senilai Rp2,45triliun.

Timbulnya permasalahan terkait ketidakpatuhan yang berdampak finansial atau timbulnya kerugian negara salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Pemda. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kurangnya volume atas pengadaan pekerjaan dan/atau barang, realisasi belanja yang tidak sesuai maupun melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas

ganda dan/atau melampaui standar yang telah ditentukan, spesifikasi dari hasil pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Permasalahan lainnya adalah adanya kelebihan pembayaran selain kekurangan volume atas pengadaan pekerjaan dan/atau barang, serta pembayaran honorarium yang dilaksanakan secara ganda dan/atau melebihi standar yang telah ditentukan.

Pengendalian internal memegang peranan penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor publik. Di lingkup pemerintah daerah, *fraud* dapat mengancam integritas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Kota Kupang sebagai salah satu pemerintah daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran dan aset publik dengan transparan dan akuntabel. Namun, beberapa kasus *fraud* yang terjadi di berbagai pemerintahan daerah di Indonesia mengindikasikan bahwa pengendalian internal yang ada masih belum sepenuhnya efektif.

Beberapa kasus korupsi pernah terjadi pada pemerintah daerah Provinsi NTT diantaranya kasus korupsi dana COVID-19 pada Kabupaten Sikka tahun 2021 dan kasus korupsi atas pekerjaan gedung Rumah Sakit Pratama (RSP) pada Kabupaten TTS tahun 2017, dan kasus korupsi pengadaan yang berupa peralatan di bidang kesehatan pada RSUD Kefamenanu di Kabupaten TTU tahun 2015.

Seiring dengan tantangan-tantangan yang ada, penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengendalian internal diterapkan dalam mencegah fraud dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Melalui wawancara dengan pemangku kepentingan kunci di pemerintahan Kota Kupang, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik pengendalian internal dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan yang lebih luas mengenai tata kelola dan akuntabilitas sektor publik. Temuan-temuan ini tidak hanya akan memberikan informasi bagi pembuat kebijakan daerah, tetapi juga menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin memperkuat sistem pengendalian internal, melindungi keuangan publik, dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah efektivitas pengendalian internal sebagai pencegahan terjadinya kecurangan di Pemerintah Daerah Kota Kupang?
b. Apakah faktor yang mempengaruhi implementasi pengendalian internal di Pemerintah Daerah Kota Kupang?
c. Bagaimanakah cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian internal mencegah terjadinya kecurangan secara lebih efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam pencegahan terjadinya kecurangan di Pemerintah Daerah Kota Kupang.
b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengendalian internal serta kelemahannya di Pemerintah Daerah Kota Kupang.
c. Memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian internal sebagai pencegahan *fraud* di Pemerintah Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah Kota Kupang: Penelitian ini dapat memberikan saran untuk mengoptimalkan pelaksanaan efektivitas pengendalian internal sebagai pencegahan terhadap kecurangan.
b. Bagi akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur mengenai pengendalian internal di sektor publik kaitannya dengan pencegahan kecurangan.
c. Bagi praktisi audit: Penelitian ini dapat memberikan gambaran atas pengendalian internal pada sektor publik guna menentukan langkah audit yang akan diambil

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

a. Bab I berisi latar belakang, rumusan terkait permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan;
b. Bab II berisi kajian teori serta tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang mendukung dilaksanakannya penelitian;
c. Bab III menjelaskan tentang objek yang diteliti, metode penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta teknis analisis data;
d. Bab IV berisi hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari hasil wawancara dan informasi yang diperoleh, serta pembahasan dengan mengkaitkan informasi tersebut terhadap aspek penelitian;
e. Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa pengumpulan informasi serta saran perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Antaranews. (2023). Kejari Sikka Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Covid-19. *https://kupang.antaranews.com/berita/106371/kejari-sikka-tahan-dua-tersangka-kasus-korupsi-dana-covid-19*,

BPK NTT. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). https://ntt.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-daerah-ihpd/

BPK RI. (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2024 (IHPS). https:// www.bpk.go.id/.

COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework.* AIGPA'S Publication Division.

Cressey, Donald R. 1973. Triangle Fraud.

Creswell, John W, (2014)., Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Detik. (2022). Kejari Kefamenanu Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Proyek Alkes di TTU. https://www.detik.com. Rabu, 25 Mei 2022 : Kejari Kefamenanu Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Proyek Alkes di TTU.

Detik. (2023). Korupsi Proyek RS Boking Rp165 Miliar 5 Tersangka Bupati TTS Diperiksa. https://www.detik.com/bali/nusra/d-6821995/korupsi-proyek-rs-boking-rp-165- miliar-5-tersangka-bupati-tts-diperiksa.

Frendy, Pruyudo, B., Suratminingsih, Pangaribuan, L. (2024). The Influence of Internal Control System, Motivation and Remuneration on The Prevention of Fraud in The Misuse of Funds in Local Government. *Jurnal AJIB (Audit Pajak Akuntansi Publik), Volume 3 No. 1. Universitas Sangga Buana YPKP.*

Kesuma, P.A., Fachruzzaman, F. (2024). Analysis of Internal Control and Fraud Prevention Efforts in Public Sector Accounting. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 12(1)*. https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1

Peraturan Pemerintah No. 12 of 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 of 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 of 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rif'an, M. J. & K. Fx. T. (2023). *Analysis Of The Effectiveness Of Internal Control On The Local Government's Financial Reports In The East Lampung Regency.* https://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.13.11.2023.p14324

Sugiyono, D. (2013). *Educational Research Methods Quantitative, Qualitative, and R&D Approaches*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Yasmin, Winarningsih, S., Mulyani, S. (2021). The Effect of The Internal Control System Effectiveness and the Quality of Financial Reporting and Its Impact on Fraud Prevention of Bandung Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik.* http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342